

KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN DALAM MENJALIN KERJASAMA DENGAN INDONESIA

Setyasih Harini

Abstract

This article explores about foreign policy of President Vladimir Putin. Under a strong leadership of President Vladimir Putin, the new Russia is gaining in influence through a series of strategic moves revolving around its geopolitical assets in energy and military. He also wants to change Russia's foreign policy. Ideological fundament-communism and class struggle no longer exist as a significant factor in Russian foreign policy; instead some pragmatist ways can be seen in foreign policy concepts and actions. Putin emphasized his pragmatism in foreign policy in most of his speeches and realized it in foreign policy actions. In views of Russia, Indonesia is a country that have a lot of potential. In addition to being in the path of international trade, Indonesia has many natural resources. So it is important for Russia to make a good cooperation with Indonesia. One of this way is cooperating with Indonesia in economic, political and military. Russia makes Indonesia as a market for the military products, where to invest and make loans. Russia also support Indonesia in dealing with terrorism and other political issues.

Keywords: Foreign Policy, Cooperating

Pendahuluan

Kerjasama antara Rusia dengan Indonesia sudah terbentuk sejak masih berbentuk Uni Soviet. Pada waktu itu pimpinan tertinggi Uni Soviet yakni Nikita Khrushchev memberikan pengakuan secara resmi kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pertemuan pertama kali kedua pimpinan negara ini diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 19 September 1956. Pertemuan tersebut membahas tentang kerjasama bilateral dengan hasil penandatanganan dokumen kerjasama di bidang politik, militer dan akademis. Sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut adalah pengiriman mahasiswa Indonesia ke Moskwa dan dibukanya Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa di Moskwa (www.kremlin.ru diakses 8 April 2012).

Jalinan kerjasama ini mengalami pergeseran setelah terjadinya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin hubungan kedua negara menjadi terganggu terlebih lagi setelah Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara merdeka. Setelah pecahnya Uni Soviet, Rusia menjadi satu-satunya pewaris

yang berusaha mempertahankan eksistensi dan karakteristik aslinya di dunia. Rusia juga berusaha untuk mengembalikan kejayaan dan kemakmuran seperti ketika masih berbentuk Uni Soviet dengan cara menjalin dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian Rusia juga menentukan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan perubahan situasi internasional dan kepentingan nasionalnya. Kondisi ini berlangsung sampai dengan munculnya pengakuan Indonesia terhadap Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet pada tanggal 28 Desember 1991.

Dalam masa jabatan Presiden Vladimir Putin yang pertama (2000-2004), Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat mengadakan pertemuan dengan Putin dalam KTT milenium PBB di New York, 7 September 2000. Sayangnya dalam pertemuan ini belum mengarah pada peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Megawati dan Vladimir Putin juga sempat mengadakan pertemuan pada saat dilaksanakannya KTT *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Shanghai,

China, tanggal 19 Oktober 2001. Vladimir Putin juga mengirimkan kawat kenegaraan kepada Megawati tanggal 13 Oktober 2002 berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memerangi terorisme dan kawat kedua tanggal 9 Oktober 2003 sehubungan dengan kecelakaan tragis di Jawa Timur (<http://www.politik.lipi.go.id> diakses 9 April 2012).

Pada masa jabatan yang kedua tepatnya tanggal 6 September 2007, Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan Putin ini dapat dikatakan sebagai kunjungan pertama presiden Rusia sejak tahun 1991. Pada saat itu, Putin dan Yudhoyono mengkaji ulang hubungan kedua negara yang telah berlangsung. Adapun fokus pembahasan kedua kepala negara adalah pada sektor ekonomi terutama peningkatan perdagangan. Selain itu juga penandatanganan dua nota kesepahaman yakni MoU antara Pertamina dengan LukOil sekitar US\$1 miliar dan MoU antara PT. Aneka Tambang dengan Rusia mengenai pertambangan bauksit dan aluminium senilai sekitar US\$3 miliar. Putin juga mengagendakan untuk memberikan kredit kepada Indonesia dalam bentuk state credit senilai US\$1 miliar untuk kebutuhan utama alat utama sistem persenjataan TNI. Rusia juga berkomitmen untuk memberikan kredit lunak dalam rangka pembelian peralatan militer (www.antara.com diakses 10 April 2012).

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Putin seakan tidak bisa terlepas dengan masalah militer. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat latar belakangnya yang seorang bekas anggota Komisi Keamanan Negara (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti-KGB*), badan intelijen Uni Soviet. Bagi Putin masa depan Rusia adalah semangat untuk berinovasi dalam teknologi militer yang berkompetisi dengan kekuatan teknologi militer Eropa Barat dan AS. Dengan kebangkitan kekuatan militer yang mendukung kemajuan ekonomi akan menjadi alasan bagi Putin untuk membangkitkan kembali kejayaan Rusia era

Uni Soviet. Untuk mencapai tujuan tersebut, mau tidak mau Putin harus mencari pangsa pasar untuk produk-produk militernya terutama di kawasan Asia yang masih banyak ditempati oleh negara-negara berkembang. Partisipasi Rusia dalam mengikuti perkembangan kawasan menjadi penting, disamping perlu terlibat lebih banyak lagi secara ekonomi agar mempunyai pengaruh nyata di Asia Pasifik. Dari sini kemudian muncul pertanyaan seperti apakah politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Vladimir Putin kepada Indonesia (2000-2008)? Dan apa sajakah bentuk kerjasama yang sudah terjalin oleh kedua negara?

Tinjauan Pustaka

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppy mendefinisikan politik atau kebijakan luar negeri sebagai keputusan dan perilaku yang ditempuh oleh negara-negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam organisasi internasional (Viotti dan Kauppy, 1999). Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano, 1999). Secara spesifik, politik luar negeri dijalankan oleh satu negara sebagai inisiatif dan reaksi menghadapi segala perubahan yang terjadi di negara lain.

Kebijakan luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional di lingkungan internasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Sebagai kajian bidang ilmu Hubungan Internasional, kajian ini berada pada interseksi antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek

internasional (eksternal) dari negara lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan nasional sebagai suatu respon terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Melalui respon tersebut, negara dapat mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan tujuan utama. Politik luar negeri meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara sebagai hasil akhir dari sekumpulan gagasan yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam hubungan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah negara lain.

Dalam pandangan Coplin (1992), politik luar negeri terbagi dalam tiga sifat yakni:, yaitu:

1. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan dari suatu kebijakan dan tindakan-tindakan langsung.
2. Politik luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Politik luar negeri yang bersifat administratif dapat dilihat dari kebijakan Presiden George Walker Bush berupa *Global War on Terrorism* (GWOT).
3. Politik luar negeri yang bersifat krisis merupakan kombinasi dari kedua keputusan yang bersifat umum dan administratif. Keputusan krisis merupakan pengambilan keputusan yang diambil secara cepat dalam situasi darurat.

Menurut Jack C. Plano (1999) ada beberapa langkah utama dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri yaitu:

1. menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. melaksanakan tindakan yang diperlukan, dan secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan uraian tersebut maka Vladimir Putin menekankan bahwa orientasi politik luar negerinya adalah pragmatisme, efektivitas ekonomi dan memprioritaskan pada terwujudnya kepentingan nasional. Berdasarkan pada konteks ruang dan waktu maka kebijakan luar negeri yang diambil Putin lebih bercorak dinamis dan berasaskan manfaat. Realisasi kebijakan luar negeri yang diambil Putin juga dilandasi pada nilai-nilai kebesaran dan kejayaan Uni Soviet. Status besar yang pernah diraih ini bukan hanya menjadi misi tapi juga ambisi Putin.

Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing

pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty&Pflatzgraff, 1995).

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Dengan adanya beberapa alasan yang mendasari suatu negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain maka Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mengalami perubahan. Perubahan ini tidak lagi didasarkan pada ideologi (komunis) namun cenderung dinamis dan humanis. Artinya Putin berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai negara tanpa memandang garis ideologi yang dianut. Bagi Putin yang terpenting dalam menjalin kerjasama adalah manfaat yang diperoleh guna meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan memajukan negaranya.

Pembahasan

Dalam pandangan Rusia, letak strategis Indonesia dapat digolongkan sebagai *bufferzone*, daerah penyangga di kawasan Asia Tenggara. Secara politik, Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda antara liberal yang dianut Australia dan komunis (sebagian negara-negara ASEAN). Secara ekonomi, Indonesia juga berada di antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sentralistik. Secara ideologi, Indonesia berada di antara kapitalisme dan komunis sedangkan dalam sistem pertahanan, Indonesia berada di antara pertahanan maritim di selatan dan kontinental di utara (www.beritammaritim.com diakses 9 April 2012). Nilai strategis lain yang dimiliki Indonesia adalah berhasil melaksanakan reformasi politik, tergolong sebagai negara demokratis dan negara Islam terbesar. Potensi Indonesia lainnya adalah letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional sehingga memudahkan untuk bermain aktif dalam politik internasional. Dengan posisinya yang berada di khatulistiwa menjadikan Indonesia kaya akan potensi alam dan selalu dapat dilalui oleh alat transportasi air.

Dengan aneka potensi yang dimiliki Indonesia maka sangat wajar bagi negara-negara besar untuk menanamkan pengaruhnya. Proses penanaman pengaruh bisa dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama. Sebagai penerus Boris Yeltsin, Putin berusaha untuk semakin menguatkan pragmatisme dalam politik luar negeri dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai landasan bukan lagi kepentingan ideologi. Dalam merealisasikan kebijakan luar negerinya, Putin lebih banyak mendasarkan negaranya pada nilai-nilai kebesaran yang pernah dialami oleh Rusia. Proses untuk membangkitkan kembali kebanggaan dan kejayaan negara tidak saja menjadi visi kepemimpinan Putin tapi sekaligus sebagai ambisi yang ingin diraih.

Tentu saja dalam meraih mimpi itu, Putin harus menghadapi banyak tantangan terutama krisis multidimensi yang dialami negaranya sebagai warisan dari pendahulunya.

Ambisi Putin untuk membangkitkan kejayaan negaranya ini dapat dilihat dari berbagai pidato kenegaraannya. Putin merivisi konsep kebijakan luar negeri Yeltsin yang pernah disahkan pada tahun 1993. Dalam konsep yang baru disahkan pada tanggal 28 Juni 2000 Putin semakin menegaskan visi, misi, dan strategi kebijakan dan politik luar negeri Federasi Rusia. Konsep ini juga menjadi pedoman bagi formulasi dan tindakan politik luar negeri Rusia dalam sebuah sistem dunia yang telah mengalami perubahan (<http://id.shvoong.com> diakses 10 April 2012). Pelaksanaan kebijakan luar negeri tidak bisa berjalan lancar tanpa mempertimbangkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal (dari pribadi Putin) yang memengaruhi politik luar negeri Putin (www.theglobal-review.com diakses 10 April 2012) adalah:

1. Dengan berbekal pengalaman selama menjalankan tugas di KGB menjadikan sosok Putin bukanlah pemimpin yang diragukan. Selama menjalankan pemerintahan sebagai presiden, Putin merupakan sosok yang tegas dan tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan. Untuk mendukung kepemimpinannya, Vladimir Putin lebih banyak mengandalkan pada dukungan dan kepercayaan dari orang-orang yang sama daerah asalnya yakni St Petersburg. Artinya Putin tidak ingin dicampuri oleh keluarganya dalam menjalankan roda politik dan hal inilah yang membedakannya dengan Presiden Boris Yeltsin.
2. Seni kepemimpinan yang dipilih Putin diwarnai dengan sifat otoriter (*dictatorship of law*) namun diterima rakyatnya. Bagi orang Rusia yang berpengalaman pada *super centralized state*, kolektivisme serta korporasi

senantiasa diletakkan diatas hak-hak individu. Paternalisme menempatkan kepentingan masyarakat diatas hak individu. Rakyat sudah terbiasa dengan pemimpin yang keras, otoriter dan tidak memberi peluang kebebasan. Bagi rakyat Rusia yang terpenting adalah perut kenyang sehingga mengabaikan gaya pemimpin. Otoriter atau demokrasi tidaklah penting sebab yang utama adalah kemampuan pemimpin dalam menyejahterakan rakyat dan kejayaan negara.

3. Dengan berbekal pengalaman selama menjadi perdana menteri, kepemimpinan Putin tidak didasarkan pada orientasi ideologi semata. Hal ini menjadi pegangan Putin untuk merangkul semua negara. Melalui pragmatisme, fokus politik luar negerinya lebih pada peran tradisional sebagai pemasok senjata, sekaligus mengakses pasar seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan energi (gas).

Dengan gaya kepemimpinan tersebut di atas menjadikan sosok Putin berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Dengan menurunnya angka kemiskinan berarti Putin juga berhasil memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ketika rakyat dapat hidup sejahtera, maka kesadarannya untuk membayar pajak juga mengalami peningkatan. Selanjutnya Rusia juga berhasil membayar hutang luar negeri dan menguatkan mata uang rubel. Bukan hanya itu, Putin juga berhasil memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, menasionalisasikan industri-industri strategis, memberantas korupsi, serta meningkatkan cadangan devisa hingga mencapai 450 dollar AS (nomor tiga di dunia pada dekade 2007-an). Bagi rakyat Rusia, Putin dianggap sebagai “satrio pinangit” karena berhasil mengembalikan kemakmuran dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini terlihat dari hasil survei *The Wall Street Journal* pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan dan dukungan rakyat terhadap Putin relatif

stabil yakni 85 % (www.theglobal-review.com diakses 10 April 2012).

Faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Putin adalah pada masa pemerintahannya harga minyak dunia naik. Naiknya harga minyak dunia diatas 90 dollar per barel merupakan berkah bagi kepemimpinan Putin. Hal ini berkaitan dengan produksi minyak Rusia yang mencapai 10 juta barel per hari. Dengan kemampuan produksi minyak tersebut berarti Rusia mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri terutama gas. Rusia bahkan bisa menjual kelebihan produksi gas ke negara-negara Eropa. Sementara itu dengan perubahan sistem internasional khususnya dengan dimulainya abad baru seperti yang disampaikan oleh Robert McNamara bahwa pada abad 21 sebagai upaya untuk menghilangkan ilusi besar yang diwariskan Presiden Woodrow Wilson ketika mencanangkan idealisme dan moralisme sebagai prinsip hubungan luar negeri Amerika dengan penghormatan terhadap "hukum internasional", "keamanan bersama" dan "hak menentukan nasib sendiri (makalah Juwono Sudarsono yang disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003). Putin menyambut abad baru dengan berusaha menjalin lebih banyak kerjasama yang berlandaskan pada humanisme dan membentuk patron baru untuk menghalangi "kebrutalan dan kesewenang-wenangan" AS terutama di Asia Pasifik.

Sebagai salah satu langkah yang ditempuh Putin adalah meningkatkan kuantitas pertemuan dan jalinan kerjasama dengan Indonesia. Semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Putin berinisiatif mengirimkan kawat kenegaraan dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan kedua negara. Pertemuan Putin dengan presiden Indonesia meningkat semasa pemerintahan Megawati. Pertemuan pertama berlangsung di sela-sela KTT APEC di Shanghai dengan mencapai kesepakatan untuk meningkatkan konsultasi politik dan pembentukan komisi

bersama Rusia-Indonesia. Pertemuan kedua terjadi di Moskwa dalam rangka kunjungan resmi Presiden Megawati (20-23 April 2003) dan ketiga pada pertemuan bilateral ketiga ketika Putin dan Megawati menghadiri KTT APEC di Bangkok (20 Oktober 2003). Pertemuan kedua menghasilkan kesepakatan imbal balik peralatan militer dari Rusia untuk Indonesia dengan pembelian pesawat jet tempur Sukhoi SU-27SK, dua jet Sukhoi SU-30MK, dua helikopter MI-35. Indonesia menjual produk minyak kelapa sawit mentah dan karet (www.kremlin.ru diakses 11 April 2012). Pertemuan ketiga antara Putin dengan Megawati merupakan langkah pembuka untuk menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan antara kedua negara untuk abad ke-21. Hubungan ini terutama pada bidang militer.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Putin juga telah tiga kali melakukan pertemuan. Pertemuan kedua kepala negara berlangsung dalam KTT APEC di Santiago (20 Nopember 2004) dan 19 Nopember 2005 di Pusan, Korea Selatan. Ketiga, ketika SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia 29 Nopember 2006. Dalam pertemuan ketiga ini kedua negara menyepakati bentuk kerjasama bidang militer, politik dan ekonomi. Kerjasama militer tidak hanya terbatas pada pengadaan peralatan tapi juga latihan bersama serta alih teknologi dari Rusia ke Indonesia. Dalam bidang politik, Rusia mendukung Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme. Untuk bidang ekonomi, Rusia meningkatkan investasi, volume perdagangan dan memberikan kredit untuk pengadaan persenjataan Indonesia untuk tahun 2007-2010.

Kesimpulan

Pada dasarnya Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin tidak lagi kaku dan kelam tapi dinamis dan humanis. Dalam menjalankan pemerintahannya, Putin berusaha memperkenalkan Rusia sebagai negara yang berubah secara evolusioner bukan

revolusioner. Dengan program barunya ini, Putin bisa dan berhasil menjalankan reformasi domestik dan dalam tata kelola hubungan luar negerinya. Perubahan ini tentu saja didasarkan pada politik luar negerinya yang tidak lagi menitikberatkan pada ideologi tapi menerima segala perbedaan. Segala usaha tersebut dilakukan Putin dengan bermuara pada kebangkitan kejayaan masa silam baik di dalam dan di luar negeri. Sebagai perwujudan dari politik luar negerinya ini, Putin bersedia membuka kembali hubungan diplomatik dengan Cina selain berkunjung ke negara-negara Asia terutama Indonesia.

Dengan Indonesia, Rusia di bawah Putin sangat berkepentingan mengingat segala potensi yang dimiliki oleh negara yang tepat berada di garis khatulistiwa ini. Seperti letak strategis Indonesia, posisi Indonesia sebagai negara demokratis dan Islam terbesar, dan keberhasilan dalam melakukan reformasi. Perbaikan hubungan Rusia dengan Indonesia telah diawali disepakatinya suatu deklarasi kerjasama sebagai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan untuk abad ke-21. Rusia juga menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar bagi produksi militer. Dengan melihat situasi Indonesia yang belum merata kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, menjadi alasan tersendiri bagi Rusia untuk memberikan pinjaman (kredit) dan meningkatkan investasi. Rusia juga bersedia memberikan dukungannya terhadap perjuangan Indonesia untuk melawan teroris. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama antara Rusia dengan Indonesia yang mengalami peningkatan selama Putin dimaksudkan untuk mengimbangi dominasi AS. Rusia dengan kebangkitan ekonomi dan militernya berusaha untuk menanamkan pengaruhnya kembali ke wilayah Asia Tenggara terutama Indonesia.

Daftar Pustaka

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppy, 1999. *International Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*,

Third Edition, Boston: Allyn and Bacon.

Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda, Jakarta: Putra A. Bardin.

James E. Dougherty, dan Robert L. Pfaltzgraft, Jr., 1995. terj. oleh Amin Rais, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

William D. Coplin, 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*, terj. Marsedes Marbun, Edisi Kedua, Bandung: Sinar Baru.

Jurnal Glasnost, Vol.4, No. 2, Oktober 2008-Maret 2009

Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol.4 No. 1 tahun 2008

www.kremlin.ru/arsip-kremlin-ri-rusia/

www.lmnd-online.org/id/menilai-politik-luar-negeri-dan-kerjasama-indonesia-rusia/

www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7924&type=4
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia>

www.antara.com/artikel-saatnya-peningkatan-dagang-indonesia-rusia/

www.beritamartim.com/opini/index/html

www.batampos.co.id/rusia-indonesia-sepakati-kerjasama-militer/

www.fas.org/irp/nic/the-putin-era-in-historical-perspective

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2251650-politik-luar-negeri-rusia/>

Mubiyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan)* Aditya Media

Mubyarto, (2002), *Makalah untuk Konperensi Nasional Pengembangan Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, 2002

Subandi, (2011), *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta